

KEMISKINAN PEREMPUAN DAN RENTENIR DI PERKOTAAN SERTA PENANGGULANGANNYA

Oleh:

Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menunjukkan peningkatan substansial dalam indikator ekonomi dan sosial selama satu dekade terakhir, disertai dengan pengurangan kemiskinan secara bertahap di wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pencapaian ini mengesankan, 13 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan, dan 40 persen rumah tangga lainnya hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Di perkotaan, sekitar 18 persen penduduk hidup miskin atau hampir miskin, dimana angka tersebut mewakili sekitar 20 juta orang. Sejalan dengan urbanisasi yang semakin meningkat, jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah sehingga akan melampaui kemiskinan pedesaan di tahun 2020 (PNPM Support Facility, 2013, hal. vi).

Masyarakat miskin perkotaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri: tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di pemukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar dibandingkan mereka yang tidak miskin. Masyarakat miskin perkotaan terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang sangat berkarakteristik kota dan padat penduduk, dimana lebih dari dua pertiga masyarakat miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa (PNPM Support Facility, 2013, hal. 4).

Secara makro, jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Pada bulan Maret 2014 GK di DKI Jakarta sebesar Rp 447.797,- atau meningkat sekitar 40 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan 0,37 poin ke posisi 3,92 persen. Tingkat kemiskinan di Jakarta selama satu dekade berada pada kisaran 3-4 persen saja dan hal tersebut sudah pada posisi terbawah sehingga sangat sulit mengharapkan jumlah penduduk miskin berkurang secara drastis (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014, hal. 15).

Berdasarkan data lebih rinci dari Susenas bulan Maret 2014, komoditi bahan makanan yang dikonsumsi terbesar oleh penduduk miskin adalah makanan jadi, rokok dan beras. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kemiskinan di Jakarta adalah yang disebut sebagai masyarakat miskin kota terdiri dari pendatang dengan keterbatasan kemampuan dan modal (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014, hal. 29).

Untuk mengatasi kekurangan modal dan penghasilan, strategi yang paling sering digunakan adalah meminjam uang dari pemberi pinjaman atau keluarga/tetangga dengan sistem kredit. Sistem kredit menjadi metode pengembangan ekonomi yang efektif di kalangan orang miskin di perkotaan karena proses pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap. Bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kredit adalah rentenir (pelepas uang) yaitu orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, hal. 949). Biasanya masyarakat memberikan jaminan berupa harta yang dimilikinya atau membayar bunga yang cukup besar kepada rentenir, sehingga pengembalian akan sulit karena akumulasi pinjaman dan bunga semakin besar.

Biasanya perempuan menjadi sasaran dari rentenir, karena perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Kemiskinan dalam rumah tangga lebih membawa dampak signifikan bagi perempuan, yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kemiskinan di kalangan perempuan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak lebih daripada laki-laki karena perempuan lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak (*International Labour Organization*, 2003, hal. 3).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan mengangkat tentang keterkaitan antara kemiskinan, rentenir, dan perempuan di perkotaan serta penanganan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam tulisan ini, penulis melakukan kajian literatur baik yang berasal dari bahan cetak maupun online, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemiskinan perempuan dan rentenir serta solusi untuk melepaskan ketergantungan dari rentenir.

PEMBAHASAN

1. Kemiskinan di Perkotaan

Para peneliti kemiskinan telah memiliki konsensus bahwa permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang multidimensional. Penjelasan mengenai kemiskinan pada *Copenhagen Programme of Action of the World Summit for Social Development* tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup; kelaparan, dan kekurangan gizi; kesehatan yang buruk; keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya; peningkatan morbiditas dan peningkatan kematian akibat penyakit; tunawisma dan perumahan yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; dan diskriminasi sosial dan pengucilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan kemiskinan dicirikan oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya (Barrientos, 2010 dalam (Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2012, hal. 1)).

Mengingat kemiskinan yang multidimensi ini, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang mencakup berbagai sektor. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Kemiskinan merupakan permasalahan utama di Indonesia yang harus dicari jalan keluarnya. Penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan bersama-sama harus dilakukan oleh berbagai pihak agar masyarakat mampu hidup secara layak. Kemiskinan mempunyai definisi yang beragam dan selalu menjadi bahan diskusi dan perdebatan tergantung dari sudut pandang persoalan yang dilihat oleh masing-masing perumus. Masyarakat miskin ditandai oleh beberapa hal yaitu ketidakmampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasar, (b) melakukan usaha yang produktif, (c) menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi baik akibat rendahnya daya tawar maupun keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia (d) mengatasi resiko penyakit, bencana alam, kegagalan panen dan sebagainya sehingga harus menjual aset produksinya serta (e) memunculkan percaya diri dan mental untuk terbebas dari warisan kemiskinan (Adisasmito, 2008, hal. 4).

Di Indonesia diperkirakan sekitar 31 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2011 dan 40% dari semua rumah tangga hidup sedikit di atas garis kemiskinan nasional yaitu US\$ 21 per bulan dan masih rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin perkotaan di kota-kota besar semakin meningkat, terutama karena Indonesia mengalami urbanisasi yang pesat. Saat ini sekitar 54 persen

populasi hidup di kota besar (2010). Ini diproyeksikan akan meningkat hingga 67 persen di tahun 2025. Peningkatan yang pesat tersebut dapat dikaitkan dengan ketiga penyebab pertumbuhan perkotaan; perluasan kota menuju perbatasan pedesaan (30-40 persen), pertumbuhan alami (35-40 persen) dan perpindahan dari desa ke kota (25-30 persen) (*World Bank Poverty Study*, 2006). Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan diproyeksikan akan melebihi kemiskinan pedesaan di tahun 2020 (*PNPM Support Facility*, 2013, hal. 1).

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011, hal. 3).

Kemiskinan terjadi apabila tingkat konsumsi rendah. Bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya. Kemudian setelah mengetahui jenis makanan yang dikonsumsi maka dikonversi menjadi jumlah kalori yang dikonsumsi karena tingkat kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang per hari sebagai batas kemiskinan.

Data kemiskinan mikro digunakan oleh pemerintah untuk penyaluran program penanggulangan kemiskinan yaitu berupa data rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Rumah tangga sasaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel 1 Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS)

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tdk tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Sumber: BPS 2010 dalam (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011, hal. 5)

2. Kemiskinan Perempuan dan Rentenir

Usaha memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Ketidakberuntungan orang miskin haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas: model pembangunan yang dianut, ketidakadilan sosial yang mengendap dalam sistem-struktur, dan berbagai kebijakan sosio-ekonomi-politik yang tidak menguntungkan bagi si lemah dan miskin (Soetrisno, 1997, hal. 7-8). Masalah kemiskinan di Indonesia lebih kepada masalah feminisasi kemiskinan yang merupakan sebuah kenyataan dimana sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan dan kaum perempuan lebih menderita karena kemiskinan dibandingkan oleh laki-laki (Cahyono, 2005; Chant, 2007 dalam (Andari, 2011, hal. 311).

Dari data *United Nation* (1997) dikemukakan bahwa situasi kemiskinan yang paling hebat terjadi di negara-negara berkembang, di mana terdapat sekitar 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70% di antaranya adalah kaum perempuan. Kondisi ini didukung data yang dikemukakan ILO (2004), yaitu: terdapat 550 juta pekerja miskin di dunia, atau orang yang tidak mampu mengangkat dirinya dan keluarga mereka berpenghasilan di atas US\$1 per hari. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 330 juta atau 60% adalah perempuan (Kumurur, 2009, hal. 74).

Pemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah akses perempuan terhadap pekerjaan dimana terjadi diskriminasi pekerjaan, peraturan tentang hak bekerja perempuan yang dianggap merugikan perusahaan serta rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal. Aspek lainnya adalah pembagian kerja perempuan, selain pekerjaan domestik/rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menjaga anak dan membersihkan rumah, pada kenyataannya di kota besar seperti Jakarta, perempuan harus ikut serta bekerja di ranah publik untuk menambah biaya kehidupan keluarganya.

Jika merujuk pada tabel 1 tentang ciri-ciri rumah tangga sasaran yang menjadi data utama untuk pengentasan kemiskinan, perempuan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan yang layak, memenuhi kebutuhan makan paling tidak sehari 2 kali, sesekali membeli daging/ayam/ susu dalam satu minggu, atau membeli pakaian baru karena perempuan terutama kaum ibu merupakan penjaga kesehatan untuk anak-anak dan keluarganya. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara bekerja atau meminjam uang baik untuk kehidupan sehari-hari maupun modal usaha. Namun keterbatasan akses kepada pemberi modal usaha mengakibatkan perempuan meminjam kepada rentenir.

Rentenir merupakan orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya serta memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (Nugroho, 2001, hal. 18). Rentenir merupakan salah satu praktek pelepas uang yang berkembang sebagai salah satu kegiatan ekonomi informal selaku penjual jasa. Praktek rentenir merupakan salah satu aktivitas ekonomi dalam meminjamkan uang yang umumnya banyak diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar biaya hidup sehari-hari maupun untuk berusaha. Bunga yang diberikan biayanya berkisar 10% s.d. 30% padahal pinjaman bank umum berkisar pada 1% s.d. 3%. Sementara plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara Rp 50.000 s.d Rp 100.000.

Pekerjaan rentenir selain dijalankan dari pintu ke pintu, tetapi juga dapat berkedok usaha seperti koperasi simpan pinjam yang memiliki surat ijin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat sehingga mereka dapat melakukan praktek pinjam-sita. Jenis pinjaman yang disajikan bermacam-macam mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat kendaraan, ijasah hingga surat tanah.

Hubungan antara rentenir dan nasabahnya disebabkan oleh beberapa hal yaitu hubungan kepercayaan, saling ketergantungan, eksploitasi dan pertentangan (Yoserizal,

tanpa tahun, hal. 11-12). Hubungan kepercayaan merupakan dasar terbentuknya suatu hubungan antara rentenir dengan nasabahnya. Rentenir akan memperlakukan masing-masing nasabah dengan cara yang berbeda, tergantung pada derajat kepercayaan yang mereka kembangkan kepada nasabah. Hubungan timbal balik antara rentenir dengan nasabah muncul, dimana nasabah memberikan pendapatan kepada rentenir berupa bunga pinjaman, dan rentenir memberi bantuan kepada para nasabah dalam memenuhi kebutuhannya akan uang.

Orang-orang yang tidak terlibat dengan rentenir menganggap bahwa rentenir adalah lintah darat yang hidup di atas rantai kemiskinan dengan memberikan bunga yang tinggi kepada nasabahnya sehingga rentenir dianggap mengeksploitasi nasabahnya dengan semena-mena menerapkan bunga pinjaman. Namun ternyata nasabah sendiri tidak menganggap dieksploitasi oleh rentenir karena dianggap tidak merugikan dan mampu menolong keluar dari masalah kesulitan keuangan (Yoserizal, tanpa tahun, hal. 13). Tidak jarang terjadi konflik dan pertentangan antara rentenir dan nasabah terutama bila nasabah bersembunyi atau sengaja menunda tidak membayar cicilan atau bunga kredit namun tidak pernah terjadi pertikaian yang menjurus pada tindakan fisik atau kekerasan.

Praktek rentenir dengan bunga tinggi dilakukan dalam berbagai bentuk baik berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Pembayarannya pun bervariasi, bisa harian, mingguan ataupun bulanan. Kebanyakan perempuan menggunakan jasa rentenir untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, namun karena bunga yang tinggi sehingga, perempuan yang sudah miskin akan semakin miskin bahkan banyak yang frustrasi karena terjatuh hutang pada rentenir. Alasan perempuan meminjam pada rentenir antara lain adalah prosedur mudah, tidak ada persyaratan yang merepotkan, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti meminjam di bank atau koperasi, ada kelonggaran waktu pembayaran, sikap rentenir yang ramah dan jangka waktu pengambilan yang pendek.

3. Pengentasan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan tidak diciptakan oleh orang miskin atau karena kurangnya permintaan atas tenaga kerja, tetapi kemiskinan terjadi karena kegagalan dalam menciptakan kerangka kerja teoretis, lembaga-lembaga dan kebijakan untuk menunjang kemampuan manusia (Yunus, 2007, hal. 204). Menurut Muhammad Yunus seorang dosen ekonomi lulusan Amerika Serikat yang berasal dari kota pelabuhan terbesar di Bangladesh yaitu

Chittagong, kemiskinan adalah akar masalah dari peperangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Perjuangan Yunus (2007) dalam mengentaskan kemiskinan melalui *Grameen Bank* diawali dari kegelisahannya sebagai seorang dosen di Universitas Chittagong yang mendapati bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkannya tidak berdaya dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di Bangladesh pada tahun 1974. Kegelisahannya kian bertambah ketika menemukan fakta bahwa seorang perempuan Desa Jobra mendadak menjadi 'budak belian' seorang rentenir, hanya disebabkan oleh pinjaman sebesar kurang dari US\$1 (+ Rp. 9.000). Kenyataan pahit itu, bahwa hidup mati seseorang hanya ditentukan oleh sejumlah 'recehan', mendorong Yunus untuk menemukan cara-cara baru untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan Bangladesh.

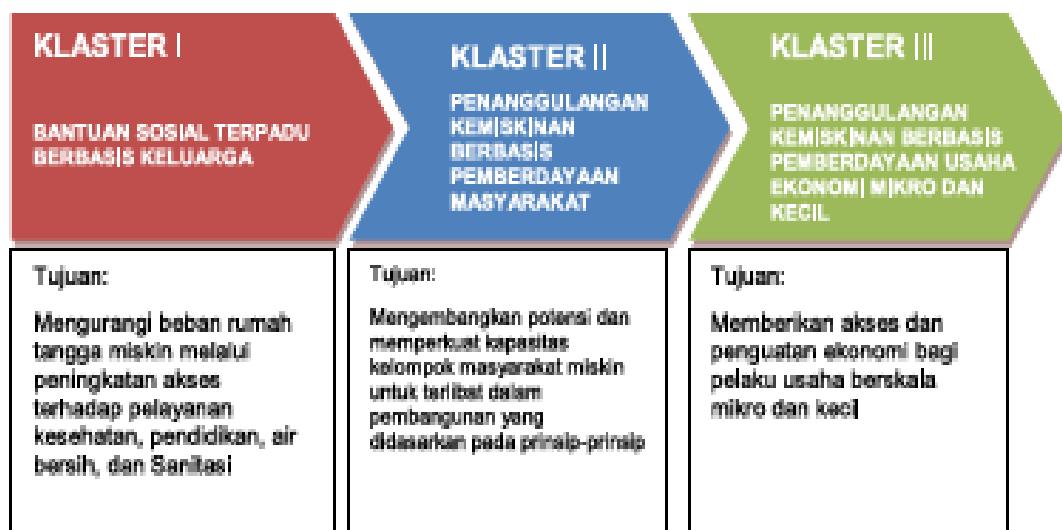
Pada saat *Grameen Bank* didirikan, strategi yang digunakannya berbeda dengan bank konvensional yaitu memberikan kredit tanpa agunan dan bunga rendah kepada mereka yang paling miskin diantara yang miskin, sistem cicilan setiap hari sehingga tidak memberatkan pada saat jatuh tempo, menciptakan birokrasi yang simpel namun inovatif sehingga kaum buta huruf pun dapat berhubungan dengan bank, mengkhususkan diri pada nasabah perempuan, membentuk sistem kelembagaan berupa "kelompok lima" dan menjadikan nasabah juga sebagai pemegang saham dan komisaris.

Menjadikan perempuan sebagai nasabah merupakan strategi yang sangat menarik. Dengan memberikan pinjaman kepada kaum perempuan Bangladesh ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi keluarga dibandingkan kepada laki-laki. Pembentukan kelembagaan dalam bentuk 'kelompok lima' juga merupakan kunci lain bagi keberhasilan program kredit *Grameen Bank*. Para nasabah diwajibkan membuat kelompok sebanyak 5-6 orang. Jika seseorang tidak mampu atau tidak mampu membayar kembali pinjamannya, kelompoknya akan dianggap tidak layak memperoleh kredit yang lebih besar di tahun berikutnya sampai masalah pembayaran bisa ditanggulangi. Dengan cara ini, tercipta insentif yang sangat kuat bagi peminjam untuk saling membantu memecahkan masalah dan mencegah timbulnya masalah. Sistem ini juga mendorong tanggungjawab pribadi yang besar untuk mengembalikan pinjaman.

Sementara pada Koran Kompas tanggal 6 November 2014 halaman 1, di Amerika Latin, kemiskinan telah dihapuskan oleh program jaminan sosial yang diluncurkan menjelang akhir 1990. Kemiskinan di Amerika Latin merupakan persoalan struktural dan upaya perlawanan kemiskinan dimulai ketika Meksiko tahun 1997 meluncurkan program

jaminan sosial yaitu pemberian bantuan makanan, layanan kesehatan dan pendidikan. Langkah tersebut dilanjutkan oleh Brasil pada tahun 1999 yang meluncurkan program *Fome Zero* (Nol Lapar, tanpa kelaparan) dan *Bolsa Escola* (Tabungan Sekolah) kemudian digabungkan menjadi program *Bolsa Familia* (Tabungan Keluarga) (Bagun, 2014, hal. 1). *Bolsa Familia* tidak hanya memberikan bantuan makanan dan layanan kesehatan tetapi menjadi instrumen efektif agar anak-anak keluarga tidak mampu bisa sekolah. Uang tunai yang dikirim melalui ATM yang tersebar di berbagai penjuru negeri dapat ditarik dengan syarat keluarga tidak mampu bersedia mengirimkan anaknya ke sekolah bahkan diberi kompensasi berupa uang tunai yang nilainya seharga pendapatan bulanan anak itu jika mengemis atau bekerja.

Indonesia, pada kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mempunyai juga program pengentasan kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didalamnya terdapat instrumen utama penanggulangan kemiskinan seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011, hal. 18)

Program penanggulangan kemiskinan pada kluster 1 bertujuan mengurangi beban rumah tangga dengan memberikan akses untuk mendapatkan pelayanan yang mendasar. Program yang sudah diluncurkan antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek

bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program berikutnya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan dana biaya nonoperasional bagi SD dan SMP sebagai wujud pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat agar dapat mengakses sekolah. Untuk menunjang BOS, maka pemerintah mengadakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) karena walau dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya masih ada siswa putus sekolah karena orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis, buku cetak, sepatu, biaya transportasi dan lain-lain yang tidak ditanggung oleh BOS.

Program lainnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa. Program terakhir pada kluster 1 adalah Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Di awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menggulirkan berbagai program jaminan sosial dalam bentuk kartu yaitu Program Indonesia Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Sejahtera dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya hanya ada perubahan nama, cakupan pelayanan dan penerima manfaat. Misalnya untuk Program Indonesia Pintar yang menggantikan Program Bantuan Siswa Miskin, penerima manfaat bukan hanya dari orang tua pemegang KPS tetapi juga anak jalanan dan pekerja anak di seluruh Indonesia. Penyaluran dananya pun berbeda, tadinya langsung diberikan tunai, sekarang diberikan dalam bentuk tabungan di kantor pos atau bank yang ditunjuk.

Program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah memang tidak berjalan pada tataran ideal. Kendala umum yang terjadi adalah tidak tepat sasaran karena

pendataan tidak akurat serta kesulitan untuk melakukan verifikasi. Selain itu terdapat kecemburuan sosial bagi yang tidak mendapatkan karena merasa berhak dan lebih miskin dari yang mendapatkan jaminan sosial. Agar keberhasilan program jaminan sosial di Indonesia berhasil maka sistem pendataan harus dilakukan dengan teliti sehingga tidak salah sasaran serta sistem kontrol dilakukan dengan portal transparansi untuk mencegah manipulasi data seperti yang dilakukan di Brasil (Bagun, 2014, hal. 15).

PENUTUP

Pada saat ini sudah banyak penyedia modal keuangan yang biasa disebut dengan lembaga keuangan mikro serta menerapkan sistem Grameen Bank, dengan perempuan sebagai nasabah utamanya dan pola yang diterapkan mengadopsi dari pola yang dilakukan Grameen Bank, sehingga diharapkan jika perempuan membutuhkan modal, tidak lagi meminjam ke rentenir, tetapi dapat meminjam uang kepada lembaga keuangan mikro yang ada di wilayahnya. Jika semua program berjalan baik, diharapkan perempuan Indonesia akan dapat lepas dari jeratan rentenir dan tidak lagi mewariskan kemiskinan kepada generasi berikutnya, karena tidak ada alasan lagi untuk meminjam uang untuk kebutuhan dasarnya seperti makan, kesehatan dan pendidikan.

REFERENSI

- Adisasmito, W. (2008). *Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.
- Andari, A. J. (2011). Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Kriminologi Indonesia*, 307-319.
- Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. (2012). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. Jakarta: Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2014). *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014*. Jakarta: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis-BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Bagun, R. (2014, November 6). Melawan Mitos Kemiskinan. *Harian Umum Kompas*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- International Labour Organization. (2003). *Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Menkoinfo RI.

- Kumurur, V. A. (2009, April). Pembangunan dan Kemiskinan Perempuan di Kota. *Ekoton*, 9(1), 73-86.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PNPM Support Facility. (2013). *Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program*. Jakarta: Menkokesra, Kementerian PU dan PNPM Mandiri.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisus.
- Yoserizal, Y. (tanpa tahun). *Hubungan Sosial antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi tentang Rentenir di Kota Pekanbaru)*. Diambil kembali dari repository unri: [http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6248/40.%20YOSE RIZAL%20-%20HUBUNGAN%20SOSIAL%20ANTARA%20RENTENIR%20DAN%20NASABAH.pdf?sequence=1](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6248/40.%20YOSE%20RIZAL%20-%20HUBUNGAN%20SOSIAL%20ANTARA%20RENTENIR%20DAN%20NASABAH.pdf?sequence=1)
- Yunus, M. (2007). *Bank Kaum Miskin*. Depok: Marjin Kiri.